



RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) MAKASSAR

TAHUN 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar [@bpspl_makassar](https://www.instagram.com/bpspl_makassar) [bpsplmakassar](https://www.facebook.com/bpsplmakassar) [BPSPL Makassar](https://www.youtube.com/BPSPLMakassar)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya hingga Penjabaran Renstra Tahun 2020 – 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Penjabaran Renstra ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rencana strategis BPSPL Makassar pada tahun 2020 – 2024, diharapkan penjabaran renstra ini dapat menjadi acuan rencana kegiatan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah.

Harapan kami sekiranya penjabaran renstra ini dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program BPSPL Makassar dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Kami menyadari bahwa penjabaran renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penjabaran renstra ini..

Maros, 22 Desember 2021

Kepala BPSPL Makassar



Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kondisi Umum.....	6
C. Potensi dan Permasalahan	14
D. Lingkungan Strategis	28
BAB II	29
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	29
A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	29
B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	29
C. Tujuan.....	30
D. Sasaran	31
BAB III	33
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
A. Arah Kebijakan Ditjen PRL.....	33
B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan BPSPL Makassar	33
C. Kerangka Kelembagaan.....	35
BAB IV	38
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	38
A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020 - 2024	38
B. Kerangka Pendanaan	42
BAB V	43
PENUTUP	43
LAMPIRAN	49

Daftar Tabel

Tabel 1 Target dan Capaian Dokumen Perencanaan di wilayah kerja BPSPL Makassar	10
Tabel 2 Luasan Kawasan Konservasi masing-masing Provinsi di Sulawesi	15
Tabel 3 Potensi Terumbu Karang	20
Tabel 4 Potensi Padang Lamun	20
Tabel 5 Potensi Perikanan	21
Tabel 6 Luas Mangrove Pulau Sulawesi	21
Tabel 7. Potensi Garam di Wilayah Sulawesi	22
Tabel 8 Produksi Garam dan Rumput Laut di Wilayah Sulawesi	23
Tabel 9. Lokasi Wisata Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	24
Tabel 10. Kebutuhan SDM BPSPL Makassar Tahun 2020-2024	36
Tabel 11. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPSPL Makassar 2020 – 2024.....	39

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Identifikasi Potensi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	12
Gambar 2. Infografis Pengelolaan Bambu Laut.....	16
Gambar 3 Infografis Pengelolaan Bambu Laut	17
Gambar 4 Infografis Pengelolaan Penyu	18
Gambar 5. Infografis Pengelolaan BCF	19
Gambar 6 Analisis SWOT Keadaan Pembangunan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.	28
Gambar 7 Bagan Struktur Organisasi LPSPL Makassar	35
Gambar 8. Peta Wilayah Kerja BPSPL Makassar.....	37

I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN- KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Kepdirjen No 1 tahun 2021 tentang Renstra DJPRL 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, menyusun Renstra BPSPL Makassar Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadibasis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Dalam kurun waktu 2014 sampai 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut(Ditjen PRL) dan Balai Pengelolaan

Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar telah banyak melakukan kegiatan kelembagaan maupun kegiatan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan ruang laut maupun dukungan manajemen di lingkup KKP.

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha), kawasan mangrove diidentifikasi (Lokasi) dan jenis ikan yang dilayani perizinan di wilayah kerja BPSPL Makassar (Jenis). Upaya pengelolaan ruang laut di wilayah kerja BPSPL tahun 2015–2019 dilakukan melalui berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Pendampingan Perencanaan ruang Laut

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pemberian persetujuan teknis dan materi teknis perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yang akan diintegrasikan dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P). Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN). Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau- Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut

kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara. Rencana Zonasi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K yang menjadi dasar pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejak tahun 2010 BPSPL Makassar berperan dalam melakukan pendampingan penyusunan RZWP3K di wilayah kerja BPSPL Makassar, dan telah sukses mendampingi penyusunan Perda RZWP3K di 6 (enam) Provinsi di wilayah kerja, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan

Provinsi Gorontalo. Pendampingan BPSPL Makassar dalam penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah diantaranya:

- 1) RZWP3K Sulawesi Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;
- 2) RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017;
- 3) RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017;
- 4) RZWP3K Provinsi Gorontalo dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018;
- 5) RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
- 6) RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

Selain itu BPSPL Makassar juga aktif terlibat dalam penyusunan rencana zonasi Kawasan antarwilayah, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT):

- 1) RZ Kawasan Antarwilayah Selat Makassar pada tahun 2017;
- 2) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Bone pada tahun 2019;
- 3) RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini pada tahun 2018;
- 4) RZ Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi pada tahun 2018
- 5) RZ KSN Maminasata pada tahun 2019;
- 6) RZ KSN Manado-Bitung pada tahun 2019;
- 7) RZ KSNT Kluster Tolitoli (Pulau Dolangan, Silando, Lingayan) pada tahun 2018;
- 8) RZ KSNT Kluster Sulawesi Utara (Pulau Kawio, Kawaluso, Marore, Batubawaikang) pada tahun 2019.

Dokumen Perencanaan ini dilegalkan menjadi Peraturan Presiden dan Peraturan MKP, dari 8 dokumen perencanaan diatas yang sudah dilegalisasi menjadi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari PP ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Kelautan dan Perikanan, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain:

- a. penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- b. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- c. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN);
- d. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri;
- e. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau- Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P). Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Tahun Anggaran 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Direktorat Perencanaan Ruang Laut memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersamaprovinci, UPT DJPRL mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

Tabel 1 Target dan Capaian Dokumen Perencanaan di wilayah kerja BPSPL Makassar

No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Ket.
1	Kawasan Antarwilayah		
	1. Selat Makassar	2017	Perpres
	2. Teluk Tomini	2018	Dokumen
	3. Laut Sulawesi	2018	Dokumen
	4. Teluk Bone	2019	Dokumen
2	KSN		
	1. Kawasan Manado – Bitung	2019	Dokumen
	2. Kawasan Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	2018	Dokumen
	3. Kawasan Perkotaan Bitung - Minahasa – Manado		
	4. Kawasan Gorontalo - Paguyuman – Kwandang		
	5. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu		
	6. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas		
	7. Kawasan Perbatasan di Prov Sulawesi Utara		
3	KSNT PPKT		
	1. Pulau Lingayan (Sulawesi Tengah)	2018	Dokumen
	2. Pulau Salando (Sulawesi Tengah)		
	3. Pulau Dolangan (Sulawesi Tengah)		
	4. Pulau Kawaluso (Sulawesi Utara)	2019	Dokumen
	5. Pulau Kawio (Sulawesi Utara)		
	6. Pulau Marore (Sulawesi Utara)		
	7. Pulau Batubawaikang (Sulawesi Utara)		
	8. Pulau Miangas (Sulawesi Utara)		
	9. Pulau Marampit (Sulawesi Utara)		
	10. Pulau Intata (Sulawesi Utara)		
	11. Pulau Kakarotan (Sulawesi Utara)		

No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Ket.
	12. Pulau Bongkil (Sulawesi Utara)		
	13. Pulau Mantehage (Sulawesi Utara)		
	14. Pulau Makalehi (Sulawesi Utara)		
	15. Pulau Kabaruan (Sulawesi Utara)		
5.	KSNT Non PPKT		
	1. Laut Sulawesi Sulawesi Utara		
	2. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah		
	3. Kepulauan Sangkarang Sulawesi Selatan		
	4. Raratotok Sulawesi Utara		
	5. Pulau Sangihe Sulawesi Utara		
	6. Pulau Lembeh Sulawesi Utara		
	7. Kema Sulawesi Utara		
	8. Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur		
6	Provinsi		
	1. Sulawesi Selatan	Perda	Poses integrasi dengan RTRWP
	2. Sulawesi Barat	Perda	
	3. Sulawesi Tengah	Perda	
	4. Sulawesi Utara	Perda	
	5. Gorontalo	Perda	
	6. Sulawesi Tenggara	Perda	

Keterangan: Dokumen Perencanaan yang sudah dilegalisasi menjadi 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Selat Makassar

2. Konservasi Jenis

Kajian mengenai jenis ikan terancam punah menjadi dasar dalam menentukan prioritas jenis yang akan dikelola untuk 5 tahun yang akan datang disesuaikan dengan amanat RPJMN sebanyak 20

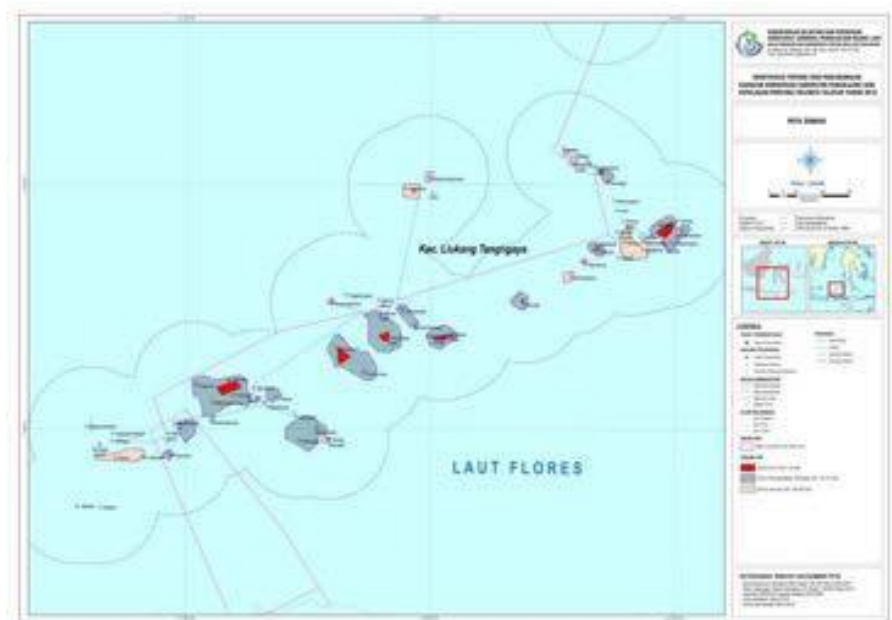
Jenis, yakni Hiu Appendiks II, Pari Manta, Ikan Napoleon, Sidat, Teripang, Hiu Paus, BCF, Penyu, Karang, Kuda Laut, Bambu laut, Mamalia Laut, Dugong, Kima, Pari gergaji, Mola-Mola, Arwana, Ikan terubuk, Hiu berjalan dan Labi-Labi. Dari kedua puluh jenis tersebut tidak semua ditemukan di wilayah perairan Sulawesi. Seperti Ikan Terubuk yang endemik di wilayah perairan Kalimantan dan Hiu berjalan yang belum pernah ditemukan di wilayah Perairan Sulawesi. Sementara jenis yang lain, terdata tersebar di

wilayah Perairan Sulawesi. BPSPL Makassar telah melakukan pendataan terhadap beberapa jenis ikan tersebut baik melalui kegiatan monitoring, survei, maupun melalui kegiatan enumerasi. Penentuan jenis prioritas disusun berdasarkan tingkat kepunahannya, keterkaitan dengan kawasan konservasi perairan di Indonesia, isu pengelolaan secara nasional dan isu global yang diwakili oleh konvensi-konvensi Internasional seperti IUCN, RFMO dan CITES. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada dokumen rencana aksi sehingga dapat mencapai output yang terukur. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. penetapan regulasi perlindungan;
- b. pendataan populasi secara berkala;
- c. rehabilitasi dan pemulihan populasi;
- d. penanganan biota terdampar;
- e. edukasi dan sosialisasi; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

3. Kawasan Konservasi

BPSPL Makassar berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem dengan memperhatikan kriteria ekologis, sosial budaya dan ekonomis.



Gambar 1 Peta Identifikasi Potensi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pencadangan kawasan konservasi bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. BPSPL Makassar

telah melakukan identifikasi potensi dan pemanfaatan untuk pencadangan di Kawasan Konservasi yang berlokasi di Kepulauan Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan survei lapangan selama 12 hari pada tanggal 21 April–2 Mei 2018 dan Sosialisasi, FGD pada 23, 25, 27 Mei 2018 serta Konsultasi Publik pada tanggal 19 Juli 2018 dengan Capaian 500.737 Ha dengan rekomendasi Tipe Kawasan Suaka Pulau Kecil.

4. Kelompok Masyarakat Pegiat Konservasi

Dalam upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi, BPSPL Makassar melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah bagi

Kelompok masyarakat pegiat Konservasi yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2021. Pemberian bantuan KOMPAK secara rutin dilaksanakan oleh BPSPL Makassar sejak tahun 2018. Sebanyak 17 kelompok masyarakat telah menerima bantuan KOMPAK berupa sarana dan prasarana kegiatan konservasi. Sarana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sebagai target kegiatan konservasi. Dalam mendukung upaya konservasi Kuda Laut bantuan KOMPAK telah diberikan kepada 2 kelompok masyarakat yang berada di Kab. Pangkep dan Kabupaten Selayar melalui pembangunan sarana pengembangbiakan Kuda Laut dan fasilitas pendukungnya. Dalam upaya perlindungan Penyu bantuan KOMPAK telah diberikan kepada 7 kelompok masyarakat pemerhati penyu yang ada di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Toli-toli, Kab. Morowali, Kab. Pangkep, Kab. Gorontalo Utara, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Polewali Mandar, bantuan diberikan berupa sarana pelestari Penyu seperti Demplot penetasan telur Penyu, tagging Penyu dan sarana pelestarian lainnya. Dalam upaya pelestarian Terumbu Karang, bantuan KOMPAK telah diberikan kepada 6 kelompok di Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kota Manado, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Kolaka Utara, bantuan diberikan berupa alat Scuba Dive, Rak Transplantasi dan fasilitas monitoring Terumbu Karang. Sedangkan dalam upaya peningkatan wisata bahari bantuan KOMPAK telah diberikan kepada 2 kelompok masyarakat di Kabupaten Bonenolango dan Konawe, bantuan diberikan berupa sarana wisata seperti perahu wisata dan alat Scuba Dive.

Pemberian bantuan pemerintah bagi kelompok masyarakat pegiat Konservasi di Sulawesi terus dilakukan, saat ini sebanyak 43 data Kelompok masyarakat pegiat Konservasi telah dikumpulkan sebagai kelompok yang akan diverifikasi untuk menerima bantuan KOMPAK sampai tahun 2024. Identifikasi dan verifikasi kelompok dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran dan tujuan.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.508 pulau (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) dimana sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km² perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km² (Ditjen PRL, 2020).

Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari empat Kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terbesar kesebelasdi dunia. Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0012'– 8' Lintang Selatan dan 116048'–122036' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores.

Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km² dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012 → 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km² yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304

kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia, hanya Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya serta hanya Pulau Jawa dan Sumatra yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi.

Bentang alam di Sulawesi mencakup empat semenanjung, yakni Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Selatan, dan Semenanjung Tenggara. Ada tiga teluk yang memisahkan semenanjung-semenanjung ini, yaitu Teluk Tomini (Teluk Gorontalo) yang membentang di wilayah perairan selatan dari Semenanjung Minahasa, Semenanjung Gorontalo, dan Semenanjung Tomini (Tomini Bocht), Teluk Tolo di antara Semenanjung Timur dan Tenggara, dan Teluk Bone di antara Semenanjung Selatan dan Tenggara. Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau dan memisahkan pulau ini dari Kalimantan. Selain itu, Sulawesi juga terletak di antara pertemuan tiga

lempeng, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan Sulawesi memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks.

Pulau Sulawesi terdiri dari 6 (enam) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) kabupaten dan kota.

Letak Pulau Sulawesi yang sangat strategis menjadikan pusat perlintasan alur pelayaran dan perdagangan di bagian Timur Tanah Air. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok). Keberadaan alur tersebut telah membuka peluang pengembangan

ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

A. Kawasan Konservasi

Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024. Pengelolaan kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari strategi kegiatan BPSPL Makassar. BPSPL Makassar berperan dalam melakukan pendampingan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah kerjanya. Berdasarkan data yang telah dihimpun, total luas kawasan konservasi yang berada di wilayah kerja BPSPL Makassar sebesar 5.650.297,59 hektar atau sebesar 19,43% dari total luas kelola laut provinsi yang ada di Sulawesi.

Tabel 2 Luasan Kawasan Konservasi masing-masing Provinsi di Sulawesi

No	Nama Kawasan	Luas Kelola Laut Provinsi (Ha)	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Persentase (%)
1	Sulawesi Utara	4,954,211.06	299.633,59	6,05
2	Gorontalo	877,321.37	75.823,83	8,64
3	Sulawesi Tengah	7,679,173.76	1.462.845,54	19,05
4	Sulawesi Tenggara	4,687,686.16	2.068.969,41	44,13
5	Sulawesi Selatan	8,783,453.07	1.534.841,22	17,47
6	Sulawesi Selatan	2,090,237.37	207.184,00	9,91
TOTAL		29.072.082,80	5.650.297,59	19,43

Total seluruh kawasan konservasi yang dicantumkan dalam Dokumen RZWP3K Provinsi sebanyak 46 yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi. Sebagian besar kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar masih dalam status pencadangan, yakni seluas 1.717.288,96 hektare sedangkan sebesar 185.128,36 hektare masih dalam status alokasi RZWP3K. Hingga saat ini, jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah

(KKPD) yang telah ditetapkan ialah sebanyak lima KKPD meliputi KKPD Tatoareng-Sulawesi Utara, KKPD Doboto-Sulawesi Tengah, KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-

Una-Sulawesi Tengah, KKPD Morowali, Morowali Utara-Sulawesi Tengah, KKPD Banggai Dalaka-Sulawesi Tengah.

B. Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan atau dilestarikan

1. Monitoring Hiu Paus

Kegiatan BPSPL Makassar berkaitan dengan hiu paus adalah monitoring dengan menggunakan 3 metode yaitu monitoring dengan melihat secara langsung/visual, menggunakan photo ID untuk membedakan jenis individu hiu paus, dan menggunakan teknologi berbasis akustik.

Hasil monitoring kemunculan Hiu Paus berdasarkan photo ID yang dikumpulkan sejak April 2016 hingga Mei 2018 adalah 22 ekor. Jumlah acoustic transmitter tag yang terpasang hingga saat ini adalah 12 unit (1 unit terlepas/hilang, sisa 11 unit yang terpasang). Sedangkan jumlah hari kemunculan Hiu Paus hasil pencatatan pada kalender musim sejak November 2016 - November 2017 adalah 95 hari, dengan musim puncak kedatangannya pada bulan Mei, Juni dan November.

2. Pengelolaan Bambu Laut



Bambu laut (*Isis hippuris*) merupakan salah satu unsur penyusun terumbu karang yang mengandung berbagai senyawa yang dapat digunakan untuk industri farmasi dan biokimia. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/Kepmen KP/2014 menetapkan status perlindungan terbatas waktu pemanfaatan bambu laut selama 5 tahun (2014-2019). Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BPSPL Makassar dalam pengelolaan bambu laut

yaitu melakukan monitoring jumlah rerata koloni dan pemberian bantuan sarana prasarana untuk konservasi bambu laut.



Gambar 2. Infografis Pengelolaan Bambu Laut

Diharapkan setelah selesainya masa status perlindungan terbatas waktu pemanfaatan bambu laut, statusnya dinaikkan menjadi perlindungan penuh, hal ini dikarenakan semakin menurunnya populasi bambu laut di alam.

3. Pengelolaan Kuda Laut



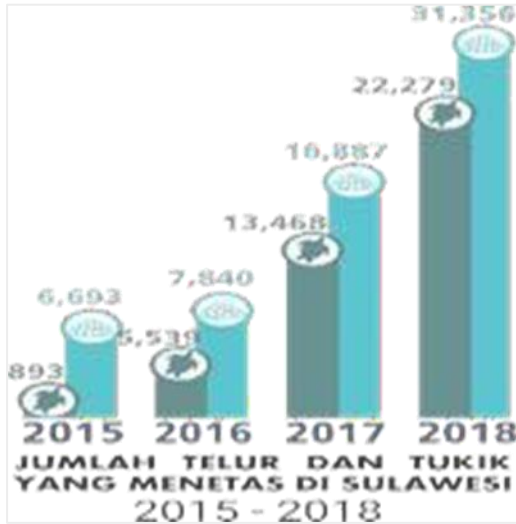
Kuda laut (*Hippocampus* sp.) memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai bahan obat-obatan maupun sebagai biota hias akuarium. Kegiatan BPSPL Makassar dalam upaya konservasi kuda laut berupa fasilitasi pengembangan usaha pengembangbiakan Kuda Laut dengan membuat rencana operasional usaha, dan menginisiasi penentuan lokasi yang sesuai untuk pengembangbiakan kuda laut di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Selain itu BPSPL Makassar memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangbiakan Kuda Laut ke kelompok masyarakat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pulau Sabutung, dan Pulau Sabangko. Survei dan monitoring kelimpahan Kuda Laut juga aktif dilakukan di Pulau Tanakeke, Desa Laiyolo (Kabupaten Pangkajene Kepulauan) dan Kabupaten Minahasa Selatan.



Gambar 3 Infografis Pengelolaan Bambu Laut

4. Pengelolaan Penyu Berkelanjutan



Di Indonesia terdapat 6 jenis penyu (*Dermochelis coriacea*, *Chelonia mydas*, *Caretta caretta*, *Natator depressa*, *Eretmochelys imbricate*, dan *Lepidochelys olivacea*) dari 7 jenis penyu di dunia. Perdagangan penyu dilarang baik hidup, mati, maupun bagian tubuhnya, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Badan internasional, CITES memasukkan semua jenis penyu dalam Appendix I dimana perdagangan penyu dilarang untuk tujuan komersil. Selain itu IUCN juga telah

menyatakan Penyu Laut masuk dalam Red List of Threatened Species.



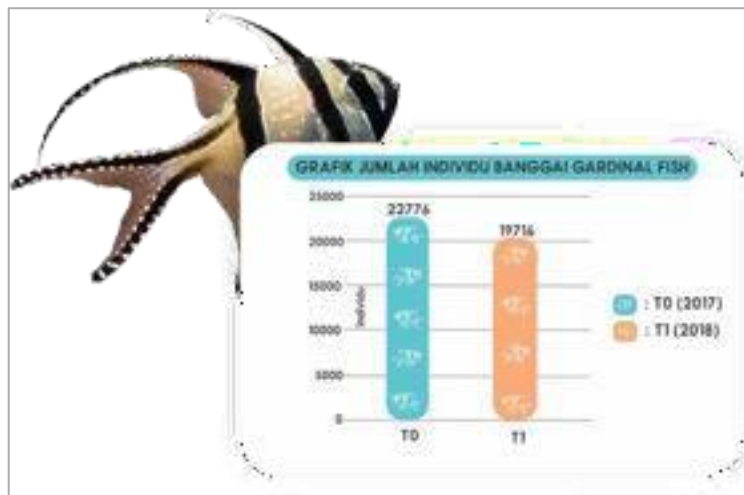
Gambar 4 Infografis Pengelolaan Penyu

5. Pengelolaan Banggai Cardinal Fish (BCF)



Banggai Cardinal Fish atau ikan Capungan Banggai merupakan ikan hias endemik di Perairan Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Lembaga konservasi dunia, IUCN Red List mengategorikan ikan Capungan Banggai sebagai spesies yang terancam punah (endangered species).

Di dalam negeri, melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 menetapkan status perlindungan terbatas ikan Capungan Banggai



Gambar 5. Infografis Pengelolaan BCF

Kegiatan konservasi ikan Capungan Banggai dilaksanakan dalam program monitoring dan pengelolaan. Dalam pelaksanaan monitoring ikan Capungan Banggai, BPSPL Makassar melakukan kolaborasi dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPSPL Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadikan sebagian besar habitat alami penting ikan Capungan Banggai yaitu di sekitar perairan laut Banggai Kepulauan sebagai kawasan konservasi perairan.

6. Respon Cepat Mamalia Laut Terdampar

Penanganan biota laut dilindungi terutama mamalia laut terdampar merupakan salah satu tugas BPSPL Makassar. Terdapat jejaring penanganan mamalia laut terdampar yang telah mendapatkan bimbingan teknis, yang dibentuk dengan pihak terkait di lingkup provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (2014), Provinsi Sulawesi Tenggara (2016), Provinsi Sulawesi Barat (2017) dan Provinsi Gorontalo 2018. Jejaring tersebut memudahkan koordinasi dan mempercepat proses penanganan mamalia laut terdampar.

C. Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan

1. Pengelolaan Hiu dan Pari Dilindungi

Tingginya permintaan pasar akan sirip dan produk olahan hiu dan Pari (daging, kulit) baik skala nasional maupun internasional mendorong eksploitasi hiu dengan penangkapan berlebih. Proses pendataan dan identifikasi penting dilakukan pada saat pendaratan hiu untuk mengetahui trend penurunan jenis hiu dan pembatasan kuota tangkapnya. BPSPL Makassar telah melakukan pendataan pendaratan Hiu dan Pari di 3 lokasi yakni di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wangarasi Gorontalo, Pulau Ambo Mamuju, dan TPI Paotere Makassar.

2. Pengelolaan Sidat

Terdapat 5 (lima) jenis sidat yang tersebar di Sulawesi yaitu *Anguilla marmorata*, *Anguilla celebesensis*, *Anguilla borneensis*, *Anguilla bicolor pacifica*, dan *Anguilla interioris*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 menetapkan perlindungan Ikan Sidat (*Anguilla spp.*) dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dan ukuran tertentu.

D. Potensi Pesisir dan Keanekaragaman Hayati Laut

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang sebesar 438.712,4 Ha Dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun sebesar 52.194,9 Ha Dengan keanekaragaman jenis mencapai ±11 jenis lamun dari 13 jenis yang terdapat di Indonesia.

Secara ekologis, mangrove merupakan pusat plasma nuftah, proteksi pantai maupun fungsi ekonomi seperti ekowisata dan bahan baku industri. Potensi Mangrove di Sulawesi dengan total luasan Hutan Mangrove sebesar 205.162,8 Ha Dengan keanekaragaman jenis mencapai ±25 jenis mangrove.

Tabel 3 Potensi Terumbu Karang

Wilayah	Total Luas	Baik	Sedang
Sulawesi Selatan	129.654,3 Ha	60,3%	22,8 %
Sulawesi Barat	16.302,0 Ha	2,6 %	44.80%
Sulawesi Tengah	186.579,9 Ha	12.30%	34%
Sulawesi Tenggara	53.153,4 Ha	16%	42%
Sulawesi Utara	28.938,8 Ha	-	-
Gorontalo	24.084,0 Ha	11.00%	37%

Tabel 4 Potensi Padang Lamun

Wilayah	Total Luas	Baik	Sedang
Sulawesi Selatan	4.938,9 Ha	52.40%	9%
Sulawesi Barat	1.674 Ha	29.30%	48.70%
Sulawesi Tengah	19.377,1 Ha	13.20%	7%

Sulawesi Tenggara	10.762,6 Ha	-	-
Sulawesi Utara	27.691,4 Ha	-	-
Gorontalo	7.750,9 Ha	13.20%	7%

Sumber : Dokumen RZWP3K Wilayah Sulawesi

Tabel 5 Potensi Perikanan

No.	Wilayah	Potensi Perikanan	Potensi Perikanan
		Tangkap (ton/tahun)	Budidaya (Ha)
1	Sulawesi Selatan	620.48	193.7
2	Sulawesi Barat	596.804	6.751
3	Sulawesi Tengah	330	43.554
4	Sulawesi Tenggara	1.520.340	58.93
5	Sulawesi Utara	228.897	8.25
6	Gorontalo	504.662	57.447

Sulawesi juga memiliki potensi sumber daya ikan baik perikanan tangkap atau budidaya yang umumnya merupakan ikan- ikan yang memiliki ekonomis cukup tinggi dan merupakan ikan-ikan komoditas ekspor. Wilayah Perairan Sulawesi memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

E. Mangrove

Tabel 6 Luas Mangrove Pulau Sulawesi

Provinsi	Luas Lahan Kritis (Ha)				Total Luas Lahan (Ha)
	Kritis Rehab	Non Rehab	Pulih	Baru	17.785,81
Sulawesi Selatan	25,38	137,61	809,77	1.543,79	2.516,55
Sulawesi Barat	8,33	81,68	114,63	922,56	1.127,2
Sulawesi Tengah	321,79	830,73	182,14	1.634,39	2.969,05
Sulawesi Tenggara	797,68	182,14	1.374,15	2.444,38	4.798,35
Gorontalo	0	313,98	143,69	222,04	679,71
Sulawesi Utara	0,2	0,67	1.916,56	3.777,52	5.694,95

Sulawesi merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan mayoritas wilayahnya berada di pesisir. Salah satu ekosistem utama pesisir adalah ekosistem mangrove, yang tersebar di seluruh Pulau Sulawesi yang terbagi ke dalam 6 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara. Ekosistem mangrove merupakan penyangga dan memiliki peranan penting dan dalam melindungi pantai dari gelombang, angin, dan badai. Secara ekologi, ekosistem mangrove berperan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi berbagai organisme akuatik dan organisme teresterial,

baik sebagai mencari makan (feeding ground), tempat asuhan (nursery ground), maupun sebagai tempat berkembang biak (spawning ground). Secara sosial ekonomi, ekosistem mangrove merupakan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu mangrove berkontribusi sebagai pengendali iklim global melalui penyerapan karbon.

F. Potensi Garam

Wilayah Sulawesi memiliki potensi pengembangan usaha garam yang tersebar di beberapa Daerah. Berdasarkan basis data di BPSPL Makassar tahun 2019, Potensi Garam di wilayah Sulawesi yang telah teridentifikasi mencapai 251,42 Ha. Adapun data sebaran potensi garam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Potensi Garam di Wilayah Sulawesi

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama Kelompok	Luas Eksisting (Ha)
1	Sulawesi Tengah	Palu	Garata	16,01
2	Sulawesi Selatan	Takalar	Paraiatte	16,00
3	Sulawesi Selatan	Pangkep	Kelompok Reski Lotong	24,60
4	Sulawesi Selatan	Pangkep	Kelompok Ujungnga	20,00
5	Sulawesi Selatan	Pangkep	Kelompok Baji Minasa	15,10
6	Sulawesi Selatan	Pangkep	Kelompok Kaju Bau	16,30
7	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Bontomanai	24,11
8	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Sipakainga	15,04
9	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Sedoa	16,24
10	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Kampung Beru	19,27
11	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Bintang Garam	15,75
12	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Pelagi	53,00
13	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Fajar Anugerah	
14	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Moontinelo	

15	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Beringin	
16	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Karya Baru	
17	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Surya Motilango	
18	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Bintang Poliyama	
19	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Anggrek	
20	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Bintang Sigeri	
21	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Sinar Garam	
22	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Mutiara Garam	
23	Gorontalo	Pohuwato	Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) Jaya Bahari	
Jumlah				

Sumber : Data primer BPSPL Makassar, 2019.

Untuk sarana Gudang Garam Nasional, berdasarkan data Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen PRL, di wilayah Sulawesi terdapat dua Gudang Garam Nasional, yakni :

- a. Gudang Garam Nasional di desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan
- b. Gudang Garam Nasional di Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk produksi garam di wilayah Sulawesi mencapai 112.816,77 ton yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Produksi Garam dan Rumput Laut di Wilayah Sulawesi

No	Provinsi	Jumlah Produksi Garam (Ton)
1	Sulawesi Selatan	111.835,03
2	Sulawesi Barat	-
3	Sulawesi Tenggara	-
4	Sulawesi Tengah	981,74

5	Sulawesi Utara	-
6	Gorontalo	-
Jumlah		112.816,77

Sumber : <https://statistik.kkp.go.id/>,2018.

G. Wisata Bahari

Sulawesi sangat kaya akan berbagai biota laut eksotis. Lewat area lautan yang membentang dan menjadi rumah bagi ratusan hingga ribuan spesies hewan laut, wisata bahari Sulawesi berhasil memikat banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Potensi Wisata Pantai bahari meliputi Wisata Pulau, Wisata *Snorkling/Selam*, Wisata mangrove/*Tracking*, dan Wisata Dermaga. Beberapa potensi wisata tersebut lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Lokasi Wisata Bahari di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

No	Provinsi	Kabupaten	Lokasi
1	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Pulau Lanjukang, Pulau Khayangan dan Pulau Samalona
		Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Pulau Badi, Pulau Panambungan, Pulau Kapoposang dan Pulau Cambang camba
		Kabupaten Bulukumba	Pantai Bira, Pantai Apparang, Pantai Bara, Pantai Ujung Tito, Pantai Marumasa dan Pulau Kambing
		Kabupaten Jeneponto	Pantai Garasikang, Pantai Ujung, Pantai Tamarunangdan Pantai Libukang
		Kabupaten Takalar	Pantai Bintang, Pantai Topejawa, Pulau Tanakeke dan Pulau Sonrobengi
		Kota Pare-Pare	Pulau Lumpue, Pulau Tonrangeng dan Pantai Senggol
		Kabupaten Sinjai	Mangrove Tongke- Tongke, Pantai larea- rea dan Pantai Liang- liang
		Kabupaten Barru	Pulau Dutungan dan Pulau Panaikang
		Kabupaten Luwu Timur	Pulau Bulupoloe

		Kabupaten Bone	Pantai Tete Tonra, Tanjung Palete dan Pelabuhan Bajoe
2	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	Pantai Mampie dan Pantai Palipis
		Kabupaten Majene	Pantai Barene dan Mangrove Majene
		Kabupaten Mamuju	Pantai Tapandulu dan Pantai Lombang- lombang
3	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Tojo una una	Kepulauan Togean
		Kabupaten Donggala	Pantai Enu, Mangrove Gonenggati, Pantai Tanjung Karang dan Pantai Bambarano
		Kabupaten Banggai Laut	Pantai Poganda, Pantai Tedung dan Desa Wisata Mbunag buang
		Kabupaten Morowali	Kepulauan Sombori
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	Kepulauan Wakatobi
		Kota Bau Bau	Pantai Nirwana
		Kota Kendari	Pantai Nambo, Mangrove Bungkutoko dan Kali Biru Bungkutoko
		Kabupaten Konawe	Pantai Toronipa, Pulau Bokori
5	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung	Pulau Lembeh dan Pantai Kahora
		Kabupaten Minahasa	Pulau Komang, Pulau Paniki, Pantai Toluna dan Pantai Pantera
		Kota Manado	Bunaken
6	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	Wisata Hiu Paus
		Kabupaten Gorontalo Timur	Pulau Diyonumo dan Pulau Cinta
		Kabupaten Gorontalo	Taman Wisata Laut Olele dan Pulau Saronde

2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Makassar memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

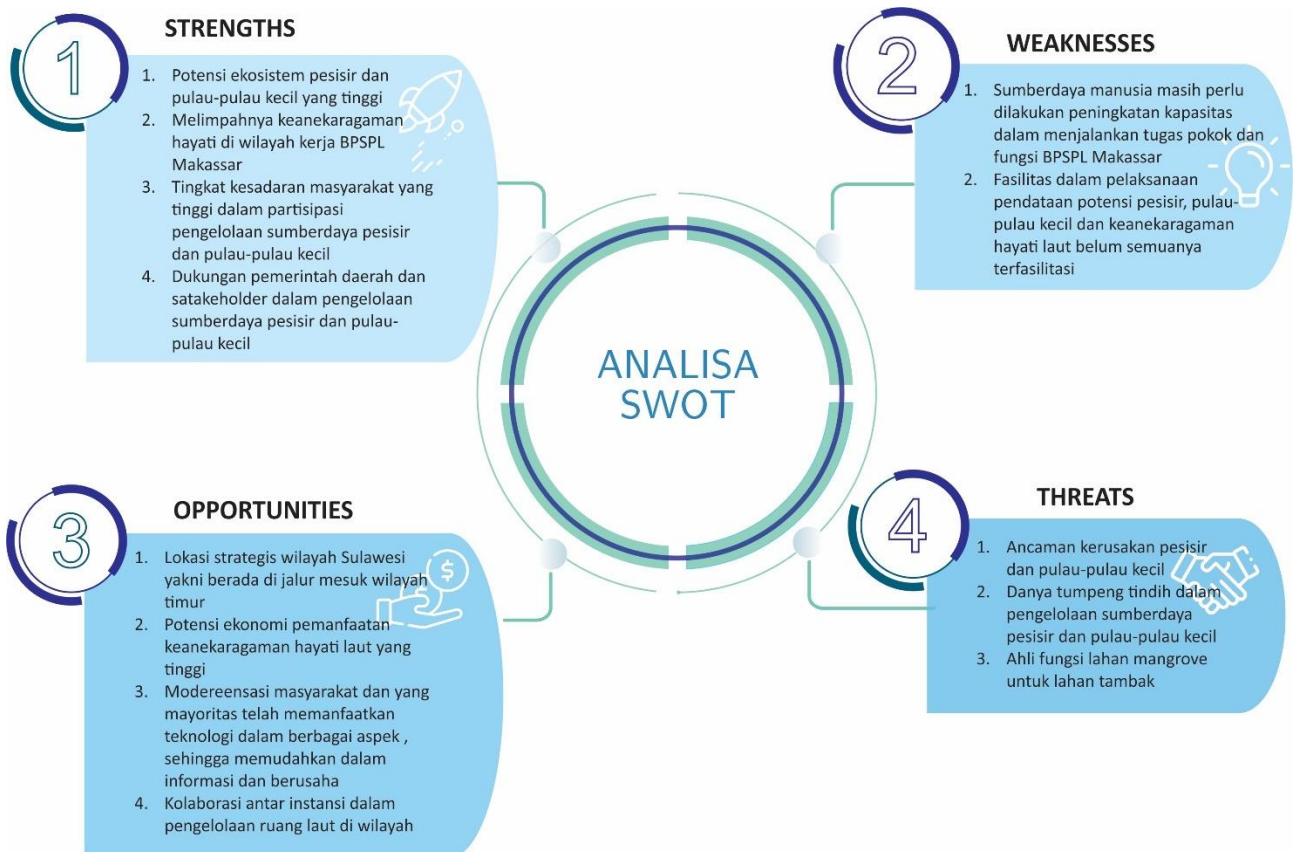
- a. Masih banyaknya Kawasan Konservasi di Sulawesi yang belum ditetapkan, sehingga diperlukan peran BPSPL untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat mengusulkan penetapan calon kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- b. Masih minimnya data sebaran populasi jenis ikan dilindungi dan atau masuk Appendiks CITES, sehingga diperlukan upaya pendataan jenis ikan dilindungi yang ada di Sulawesi.
- c. Makin terdegradasinya habitat ikan terutama terumbu karang baik dikarenakan oleh penangkapan ikan yang merusak maupun dikarenakan pemanasan global, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya perbaikan atau rehabilitasi terumbu karang.
- d. Pengetahuan masyarakat mengenai jenis ikan dilindungi dan atau masuk Appendiks CITES yang tidak boleh dimanfaatkan masih sangat minim sehingga masih sering terjadi pemanfaatan jenis ikan tersebut, untuk itu diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan terus menerus. Selain itu juga sering terjadinya kejadian mamalia laut terdampar di pantai Sulawesi juga memerlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait carapenanganan mamalia laut terdampar tersebut.
- e. Kelompok masyarakat penggerak konservasi yang ada di Sulawesi banyak jumlahnya namun masih sedikit yang dapat bertahan melakukan aktifitas konservasi, oleh karena itu diperlukan pendampingan dan pemberian bantuan agar dapat tetap melakukan upaya-upaya konservasi;
- f. Untuk dapat melaksanakan konservasi baik konservasi jenis maupun konservasi kawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum maupun Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara khusus dalam hal ini didelegasikan kepada BPSPL tidak dapat melakukan upaya-upaya konservasi sendiri, kerjasama dengan pihak lain baik

Universitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan upaya yang wajib dilakukan agar dapat sama-sama melaksanakan upaya-upaya konservasi.

- g. Selain terumbu karang ekosistem pesisir yang mengalami banyak kerusakan adalah mangrove, hampir di berbagai daerah di Sulawesi hutan mangrove mengalami kerusakan, oleh karena itu diperlukan upaya rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Sulawesi. Sebelum dilakukan rehabilitasi perlu dilakukan identifikasi lokasi-lokasi yang mendesak untuk dilakukan rehabilitasi sehingga lokasi yang direhabilitasi merupakan lokasi yang tepat dan menggunakan metode rehabilitasi yang tepat pula.
- h. Semua Provinsi di Sulawesi sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Provinsi, namun masih banyak pemanfaatan wilayah pesisir yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut, diperlukan upaya monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- i. Pengelolaan sektor garam yang masih terus digalakkan dengan permasalahan rendahnya kualitas garam konsumsi melalui program Peningkatan kualitas garam konsumsi, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), diperlukan penyediaan sarana prasarana garam yang ada di Sulawesi.
- j. Pulau Sulawesi memiliki potensi wisata bahari yang sangat banyak namun pemanfaatannya belum optimal, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari salah satunya adalah dengan program Desa Wisata Bahari.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Untuk mengetahui keadaan pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah kerja BPSPL Makassar dilakukan analisis SWOT dengan mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal berikut ini:



Gambar 6 Analisis SWOT Keadaan Pembangunan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Visi BPSPL Makassar tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020-2024. Dengan demikian Visi BPSPL Makassar adalah "Terdepan dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut Wilayah Sulawesi menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL"

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau– Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Makassar, maka, ditetapkan Misi BPSPL Makassar sebagai berikut:

1. perencanaan ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;
2. pendayagunaan pesisir dan pulau–pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
3. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
4. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Makassar;
5. peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Makassar.

C. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan misi BPSPL Makassar, BPSPL Makassar merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau–pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar;
3. Misi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
4. Misi penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
5. Misi peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Makassar dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Makassar.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Makassar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;
2. tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar.

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup

1. tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 3) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 4) meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;

2. tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar;
- III. Program Dukungan Manajemen
1. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar.



**ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI PELAKSANAAN,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020- 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 yang memerlukan dukungan BPSPL Makassar yaitu:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan BPSPL Makassar

Strategi pelaksanaan kegiatan BPSPL Makassar yang akan ditempuh untuk masing–masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

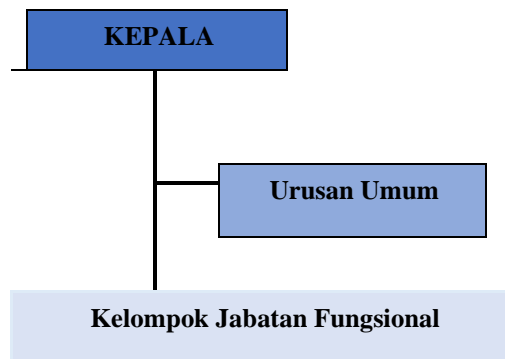
1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. pendampingan dalam penerbitan KKPRL yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - c. dukungan operasionalisasi pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;

- d. pengelolaan data KKPR di wilayah kerja BPSPL Makassar.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - b. evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - c. penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - d. pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - e. inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - f. rehabilitasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - g. penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - h. pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - i. inisiasi jejaring dan kerjasama konservasi Kawasandan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - j. kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar;
3. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil melalui:
 - a. identifikasi kawasan mangrove di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - b. penanaman mangrove di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - c. pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Makassar;
4. penataan dan pemanfaatan Jasa kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
 - a. pembangunan sarana dan/ atau prasarana sentra ekonomi garam rakyat di wilayah kerja BPSPL Makassar;

- b. fasilitasi pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar;
5. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BPSPL Makassar;
 - b. penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPSPL Makassar;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSL Makassar;
 - d. pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengadaan barang jasa dan umum di BPSPL Makassar;

C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPSPL Makassar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



Gambar 7 Bagan Struktur Organisasi LPSPL Makassar

BPSPL Makassar hingga tahun 2021 memiliki total Sumberdaya Manusia sebanyak 65 Orang, yang terdiri dari 49 berstatus sebagai ASN, dan 16 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di BPSPL Makasar adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dengan jumlah SDM 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda; 1
 - (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 1
 - (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil;
 - 1 (satu) Jabatan Fungsional Barang Milik Negara; 1
 - (satu) Analis Organisasi dan Tata Laksana;
 - 1 (satu) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 1
 - (satu) Pengelola keuangan.
2. Sub Koordinator Program dan Evaluasi, dengan jumlah SDM (empat) orang, terdiri atas:
 - 1 (satu) orang Perencana Muda;

- 1 (satu) orang Analis Perencanaan;
 - 2 (dua) orang Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian, dengan jumlah SDM 37 orang, terdiri atas:
- a. 6 (enam) orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda;
 - b. 18 (delapan belas) orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama;
 - c. 5 (lima) orang Analis Kelautan dan Perikanan;
 - d. 7 (tujuh) orang Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir;
 - e. 1 (satu) orang Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi BPSPL Makassar dengan wilayah kerja yang sangat luas maka diperlukan tambahan SDM yang memadai, proyeksi penambahan SDM BPSPL Makassar sampai tahun 2024 ditampilkan pada tabel dibawah ini:

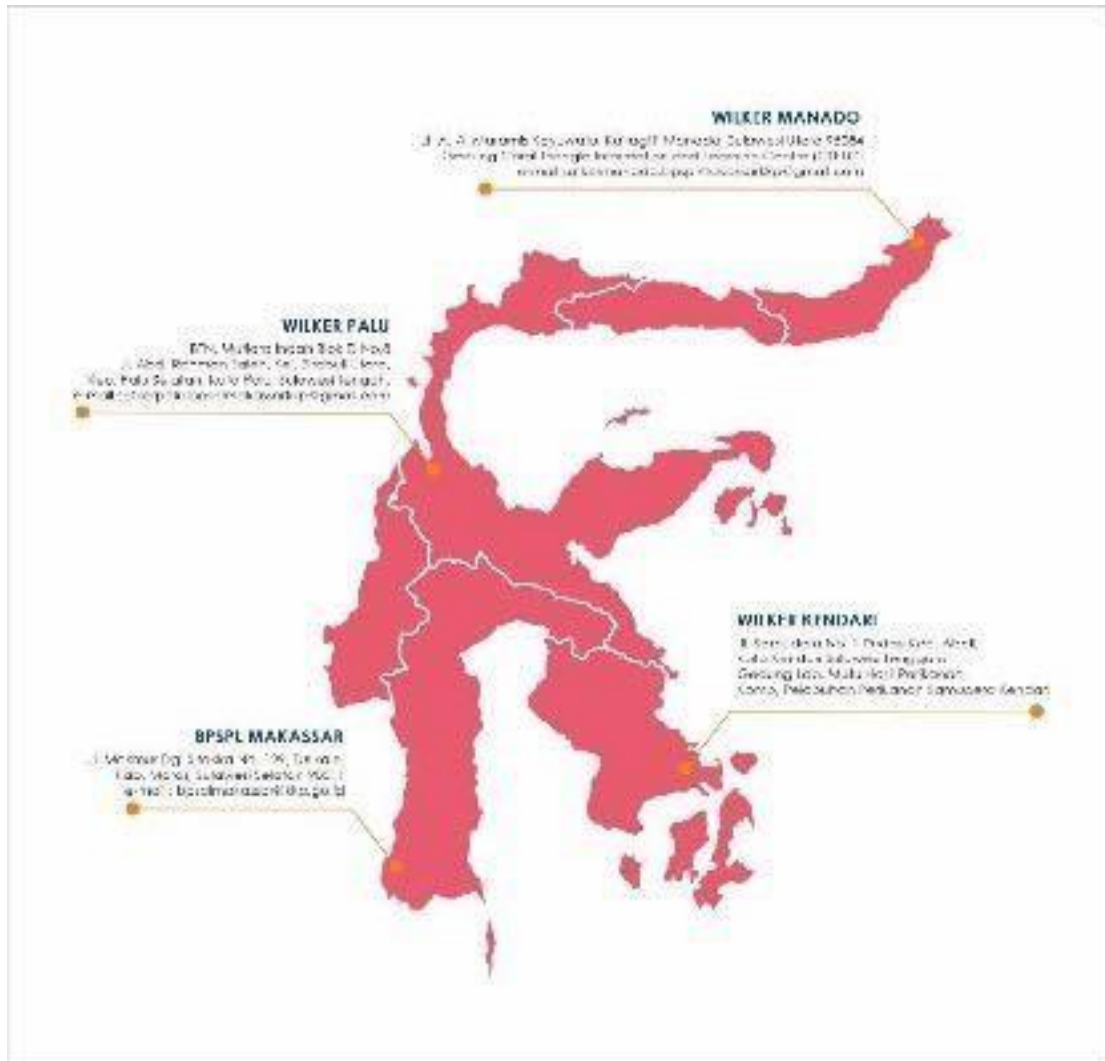
Tabel 10. Kebutuhan SDM BPSPL Makassar Tahun 2020-2024

Nama Jabatan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelola Ekosistem laut dan Pesisir Ahli Madya*	1	0	0	0	0
Pengelola Ekosistem laut dan Pesisir Ahli Muda*	2	0	1	1	1
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	2	1	1	0	1
Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0	1	0
Pranata Keuangan APBN Penyelia*	1	0	1	0	0
Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/ Mahir	1	0	0	0	0
Arsiparis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	1	1	0	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	0	0	1
Analis Keuangan	0	0	1	0	0
Penata Komputer Pelaksana Terampil	0	0	0	1	0
Pengelola Rumah Tangga	0	0	0	0	1
Pengadmistrasi Umum	1	0	0	1	0

(sumber: Kepegawaian BPSPL Makassar, 2021)

Wilayah Kerja BPSPL Makassar sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 mencakup seluruh Sulawesi yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sampai saat ini kantor perwakilan BPSPL Makassar baru ada di 3 (tiga) provinsi yaitu di Palu Sulawesi Tengah, Manado Sulawesi Utara dan Kendari Sulawesi Tenggara adapun data tersebut dapat dilihat pada gambar 8 dibawah ini:



Gambar 8. Peta Wilayah Kerja BPSPL Makassar

IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020 - 2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakandan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Ditjen PRL, maka BPSPL Makassar telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Makassar 2020–2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Tabel 11. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPSPL Makassar 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Makassar (Ha)	-	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Jenis)	2	7	8	8	8
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	3	3	3	3	3
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	1	4	4	4	4

	konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	-	2	2	2	2
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	2	-	-	3	3
		7	Kawasan Mangrove pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	-	-	-	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
6	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	8	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (dokumen)	-	-	1	1	1
7	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar	9	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Makassar (unit)	-	-	-	3	3

8	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar	10	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	-	-	-	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
9	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar	11	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	-	72,5	72,5	72,5	72,5
		12	Indeks profesionalitas ASN BPSPL Makassar (indeks)	72	73	88	88	88
		13	Nilai WBK BPSPL Makassar (nilai)	78	78	78	78	78
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Makassar (nilai)	90	91	91	91	91
		15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPSPL Makassar (%)	82	84	86	88	90
		16	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	70	75	80
		17	Nilai IKPA BPSPL Makassar (nilai)	88	89	89	90	90
		18	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Makassar (nilai)	85	86	87	88	89
		19	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Makassar (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan BPSPL Makassar tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 70,730 Miliar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Makassar 2020- 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen PRL 2020-2024.

V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Renstra BPSPL Makassar tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan BPSPL Makassar dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020- 2024 di wilayah kerja BPSPL Makassar, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPSPL Makassar tahun 2020- 2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MATRIK KERANGKA PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) MAKASSAR 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL BPSPL MAKASSAR						10,272	11,033	12,550	17,950	18,925	70,730	
Program Kualitas Lingkungan Hidup						1,647	1,995	2,650	5,450	6,125	17,867	
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut						1,547	1,995	2,650	3,050	3,525	12,767	
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar						-	0,170	0,200	0,250	0,325	0,945
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Makassar (Ha)	-	200.000	200.000	200.000	200.000						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar						0,470	0,590	0,900	1,000	1,000	3,960
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Jenis)	2	7	8	8	8						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar						0,975	1,043	1,300	1,500	1,800	6,618

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	3	3	3	3	3						
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar						0,102	0,192	0,250	0,300	0,400	1,244
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	1	4	4	4	4						
	b. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	-	2	2	2	2						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							0,100	-	-	2,400	2,600	5,100
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar						0,100	-	-	2,400	2,600	5,100
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	2	-	-	3	3						
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja	-	-	-	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	BPSPL Makassar Kawasan (Kawasan)											
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							-	-	0,400	2,500	2,500	5,400
Perencanaan Ruang Laut							-	-	0,400	1,000	1,000	2,400
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar						-	-	0,400	1,000	1,000	2,400
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (dokumen)	-	-	1	1	1						
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							-	-	-	1,500	1,500	3,000
	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar						-	-	-	1,000	1,000	2,000
	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Makassar (unit)	-	-	-	3	3						
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar						-	-	-	0,500	0,500	1,500
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	-	-	-	1	1						
Program Dukungan Manajemen							8,625	9,038	9,500	10,000	10,300	47,463
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							8,625	9,038	9,500	10,000	10,300	47,463

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar						8,625	9,038	9,500	10,000	10,300	47,463
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	-	72,5	72,5	72,5	72,5						
	Indeks profesionalitas ASN BPSPL Makassar (indeks)	72	73	88	88	88						
	Nilai WBK BPSPL Makassar (nilai)	78	78	78	78	78						
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Makassar (nilai)	90	91	91	91	91						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPSPL Makassar (%)	82	84	86	88	90						
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	65	70	75	80						
	Nilai IKPA BPSPL Makassar (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Makassar (nilai)	88	89	89	90	90						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Makassar (%)Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup BPSPL Makassar	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup BPSPL Makassar (bulan)	12	12	12	12	12						

Maros, Desember 2021
Kepala BPSPL Makassar,



Getreda Melsina Hehanussa

LAMPIRAN